

Pengaruh pemberontakan Republik Maluku Selatan terhadap kondisi sosial politik di Indonesia

Devi Putri Angelina^{1*}, Lutfiah Ayundasari²

Universitas Negeri Malang, Kabupaten Blitar, deviangelina65@gmail.com

Universitas Negeri Malang, Kota Malang, lutfiah.fis@um.ac.id

*Corresponding email: deviangelina65@gmail

Abstract

This paper is a study that discusses the rebellion of the Republic of South Maluku. This rebellion was motivated by the many former soldiers of the KNIL (Dutch Indies Colonial Army) who were disappointed with the recognition of Dutch independence to Indonesia. In addition, he did not agree with the dissolution of the NIT (State of East Indonesia) and the return of Indonesia to a unitary state. Basically, the Republic of South Maluku could not be separated from the federal system of the Indonesian state during the Dutch Military Aggression. The formation of the Republic of South Maluku was also influenced by dissatisfaction with the process of the return of the United States of Indonesia to the Unitary State of the Republic of Indonesia. In addition, it is caused by factors of the interests of certain parties such as the selfishness of a leader who does not want to step down from office and many parties who are against the discourse of a unitary state. The formation of the Republic of South Maluku greatly influenced the socio-political conditions in Indonesia, including the disruption of relations between groups in Maluku and the division of the Unitary Republic of Indonesia.

Keywords

RMS; RIS; Social; Politics

Abstrak

Tulisan ini merupakan kajian yang membahas tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh kekecewaan bekas prajurit KNIL (Tentara Kolonial Hindia Belanda) dengan pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Selain itu tidak setujunya atas pembubaran Negara Indonesia Timur dan kembalinya Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan. Pada dasarnya, Republik Maluku Selatan tidak bisa dilepaskan dari sistem federal negara Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda. Terbentuknya Republik Maluku Selatan juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan rakyat maluku dengan proses kembalinya Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu disebabkan oleh faktor kepentingan pihak-pihak tertentu seperti keegoisan seorang pemimpin yang tidak ingin lengser dari jabatan dan banyak pihak yang kontra dengan wacana negara kesatuan. Terbentuknya Republik Maluku Selatan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial politik di Indonesia, meliputi hubungan antar kelompok di Maluku terganggu dan terpecahnya NKRI.

Kata kunci

RMS; RIS; Sosial; Politik

**Received: 9 April 2021*
**Accepted: 29 October 2021*

**Revised: 4 October 2021*
**Published: 30 October 2021*

Pendahuluan

Republik Maluku Selatan atau yang biasa disebut dengan RMS merupakan gerakan separatisme yang dibentuk untuk menentang proses kembalinya RIS menjadi NKRI (Waileruny, 2010). Pembentukan RMS ini memiliki tujuan yang sama dengan terbentuknya pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan yang dilakukan kedua kubu ini sama-sama menggunakan unsur KNIL yang tidak jelas keberadaannya setelah adanya Konferensi Meja Bundar (KMB). Berhasilnya anggota APRIS membuat masyarakat Maluku Selatan bersemangat dan sangat yakin untuk kembali ke pangkuan NKRI. Namun dalam usahanya tersebut mendapat beberapa pertentangan dari beberapa pihak.

Pertentangan-pertentangan yang timbul mengakibatkan aksi teror-meneror dari pihak penentang, sehingga menyebabkan korban jiwa dari aksi teror tersebut. Sehingga selepas kejadian tersebut, benih-benih gerakan separatisme muncul dan para birokrat pemerintah daerah berusaha memprovokasi masyarakat Ambon agar masyarakat Ambon waspada terhadap penggabungan wilayahnya terhadap NKRI, karena ditakutkan bisa menimbulkan suatu bahaya yang terjadi di hari selanjutnya. Tiba di tanggal 20 April 1950 terdapat pengajuan pendapat yang tidak percaya kepada pihak parlemen Negara Indonesia Timur yang membuat kabinet Negara Indonesia Timur meletakkan jabatan dan berakhir pada pembubaran NIT lalu bergabung pada NKRI sekaligus menjadi salah satu kegagalan pemberontakan dari Andi Abdoel Aziz (Andi Aziz) yang memicu berakhirnya Negara Indonesia Timur.

Hal ini mendapat respon dari Dr. Soumokil dan para anggota yang tetap berpegang teguh terhadap pendiriannya untuk tidak menyerahkan Maluku pada NKRI. Saat perundingan di Ambon, para anggota dari KNIL dan Ir. Manusaman, yang mengusulkan agar Maluku Selatan tetap menjadi wilayah yang merdeka, namun usulan ini membuat tegang karena adanya sebuah usulan yang menyarankan agar membunuh seluruh anggota dewan di Maluku Selatan. Tetapi usulan dari anggota KNIL ditolak dan anggota dewan bahkan memberikan usulan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan di Maluku Selatan yang dilakukan langsung oleh Kepala Daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu. Proklamasi ini kemudian disetujui olehnya, karena saat itu J. Manuhutu berada dalam paksaan senjata yang dilakukan oleh anggota KNIL.

Metode

Penulisan ini menggunakan metode historis atau metode sejarah yang fokus terhadap pemberontakan Republik Maluku Selatan yang bersikap tegas menolak wacana kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kuntowijoyo (2005), dalam penelitian sejarah ada lima tahapan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik),

verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan penulisan (Historiografi). Dalam penulisan ini juga menggunakan suatu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan kajian kepustakaan yang berkaitan dengan membaca, mencatat, dan metode pengumpulan data pustaka serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Menurut Harahap (2014), disebutkan bahwa dalam penelitian kepustakaan berasal dari perpustakaan baik jurnal, buku, kamus, dokumen, ensiklopedia, majalah, dan lain sebagainya. Sebelum mengumpulkan berbagai sumber dari buku ataupun jurnal ilmiah, penulis terlebih dahulu menentukan tema yang akan dibahas dalam artikel ini. Sehingga penulis semakin mudah untuk mencari dan menemukan sumber-sumber yang sesuai untuk melengkapi artikel ini. Berbagai sumber yang telah terkumpul berupa buku dan jurnal ilmiah, kemudian dibaca dan dipahami untuk mencari pokok-pokok pembahasan yang tepat dan aktual terkait dengan peristiwa pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan dengan proses kembalinya Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Republik Maluku Selatan

Republik Maluku Selatan merupakan wilayah Indonesia yang berdiri sendiri dan memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 April 1950. Proklamasi ini dilakukan oleh orang-orang pro-Belanda seperti Dr. Soumokil yang merupakan bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur dan dilakukan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL. Dr. Soumokil ini memiliki misi untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur. Namun pemerintah pusat menganggap bahwa tindakan RMS merupakan suatu pemberontakan. Pemerintah pusat berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai yang dipimpin oleh Dr. Leimena yang bertugas untuk membawa misi perdamaian ke Ambon. Namun pada akhirnya misi perdamaian itu ditolak oleh Dr. Soumokil yang saat itu menjadi Presiden RMS. Pada akhirnya RMS berhasil ditumpas tuntas pada November 1950.

Pada perkembangannya terbentuklah pasukan yang dipimpin oleh Kolonel A. A Kawilarang untuk menumpas RMS. Penumpasan RMS dimulai pada 14 Juli 1950 yang dilakukan pasukan APRIS/TNI yang memilih dahulu untuk menyerang tempat-tempat penting yang termasuk persembunyian RMS. Pada saat itu RMS berpusat di Pulau Seram dan Ambon, serta menguasai perairan laut Maluku Tengah. Selanjutnya RMS berhasil untuk menghancurkan kapal-kapal yang di tumpang oleh pemerintah. Namun pada akhirnya pemberontakan Republik Maluku Selatan dapat digagalkan, sehingga para pemimpin Republik Maluku Selatan mengasingkan ke Belanda. Terdapat 4.000 penduduk Maluku Selatan dan tentara KNIL beserta keluarganya juga ikut mengungsi pada tahun 1951.

Selanjutnya, para pemuda Maluku berhasil mengibarkan bendera RMS tepat dihadapan Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Juni 2007 yang bertepatan dengan hari keluarga nasional di Ambon. Perdana Menteri John Watilette yang merupakan perdana Menteri RMS di pengasingan Belanda memiliki pendapat bahwa jika mendirikan suatu republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong yang mustahil akan terjadi pada peringatan proklamasi kemerdekaan RMS ke 58 tahun. Dengan seiring berjalannya waktu, tujuan dari politik RMS semakin lemah, hal ini disebabkan oleh tidak ada lagi donatur yang menyisihkan dananya untuk RMS.

Peran Belanda dalam Pembentukan RMS

Peran Belanda dalam Pembentukan RMS diawali oleh pengungsian beberapa tokoh RMS yang pergi ke Belanda. Dengan seiring berjalannya waktu, kebijakan pemerintahan meliputi politik, sosial, keamanan dan luar negeri di Belanda dijalankan oleh pemerintah RMS. Hal ini sangat menguntungkan bagi RMS, karena pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan Birokrat di Ambon dapat berkomunikasi berjalan lancar. Namun di sisi lain, pemerintahan Soekarno tidak bisa melihat aktivis rakyat Maluku, sehingga pemerintahan Sukarno mengeluarkan perintah untuk menangkap seluruh pimpinan RMS dan jajarannya. Menurut (Fuar, 1962) kemerdekaan RMS didukung oleh pemerintahan Belanda yang memiliki jabatan-jabatan penting pada saat itu. Jabatan tersebut meliputi kepolisian dengan tingkatan inspektur dan komisar, namun pada perkembangannya beberapa dari pemerintahan RMS meluncurkan serangan kepada pemerintah Belanda dengan alasan protes terhadap pemerintah Belanda, karena pemerintah Belanda tidak sepenuh hati memberikan dukungan kepada RMS. Peristiwa tersebut bernama Wassenaar yang terjadi pada tahun 1987. Pemerintah Belanda menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan aksi teror yang dilakukan oleh aktivis RMS di Belanda.

Tujuan Pemberontakan RMS di Maluku

Pemberontakan ini terjadi karena kepentingan dari perseorangan saja. Jaksa agung Negara Indonesia Timur, yaitu Dr. Soumokil yang berkeinginan untuk melepaskan wilayah Maluku khususnya Maluku Selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiba saatnya proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan, Dr. Soumokil berhasil menampung seluruh kekuatan dari beberapa masyarakat Maluku. Sementara itu, Dr. Soumokil mengancam memasukkan penjara kepada masyarakat yang lebih pro terhadap NKRI, hal ini dipengaruhi oleh anggapan buruk Dr. Soumokil terhadap NKRI. Tepat pada tanggal 25 April 1950, para anggota Republik Maluku Selatan berhasil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh J.H Manuhutu sebagai pimpinan dan pendampingnya adalah Albert Wairisal yang menjabat sebagai Perdana Menteri sementara itu Dr. Soumokil sebagai Menteri. Dalam perkembangannya, Soumokil diangkat menjadi presiden Republik Maluku Selatan pada tanggal 3 Mei 1950.

RMS dan Konflik Maluku

Puncak dari kerusuhan di Maluku terjadi pada tahun 1999 (Hartati, 2010). Hal ini ditandai dengan terbakarnya kantor gubernur Maluku, serangan terhadap penduduk Soya, dan pada akhirnya pengibaran bendera RMS. Tiba pada upacara yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2007, ada penyusupan dari beberapa aktivis RMS yang berhasil masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta pejabat lainnya. Pada pertengahan acara, tepatnya setelah penyampaian sambutan oleh Gubernur Maluku dilanjutkan dengan pertunjukan tarian Cakalele, tarian tersebut tidak termasuk dalam susunan acara, tetapi adegan tarian Cakalele ini dibiarkan begitu saja oleh aparat karena tidak mengganggu jalannya acara. Namun tidak sadari tiba-tiba para penari tersebut mengibarkan bendera RMS. Selanjutnya aparat membawa para penari tersebut di kantor Densus 88 Anti Teror untuk ditahan.

Penumpasan Pemberontakan RMS dengan Cara Damai

Banyaknya penjajahan di Indonesia oleh kaum imperialis membuat para pemimpin RI sadar dalam menghadapi setiap gejolak yang bertujuan untuk memecahkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat paham akan watak dari para kolonialis yang memiliki seribu muka. Selain itu pemerintah Indonesia juga tahu bahwa pemerintah Hindia Belanda ada di belakang aksi pemberontakan RMS. Pemerintah Indonesia menyadari akan tanggung jawabnya untuk menjaga kedaulatan bangsa dan kewajiban untuk menjaga serta menjamin keselamatan bangsanya. Dengan alasan tersebut, maka pilihan yang pertama untuk penumpasan pemberontakan RMS ini menggunakan cara yang damai dan membuang jauh aksi yang berbau dengan militer (Leirissa et al, 1993).

Penumpasan pemberontakan secara damai ini dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Maluku pada 12-13 Juni 1950 dengan dihadiri wakil-wakil Maluku di seluruh Indonesia. Dalam konferensi Maluku ini dibentuk misi persaudaraan yang terdiri atas Sapulete, Domine Siahaja, J. Fernandes, J. Tamasale, dan A Kailola. Dalam konferensi tersebut menghasilkan butir-butir pernyataan yang bertujuan untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan dalam menyelesaikan peristiwa RMS. Pernyataan tersebut meliputi:

- a) Maluku diberi hak otonomi seluas-luasnya
- b) Pemerintah memberikan bantuan sosial terhadap rakyat Maluku Selatan yang menderita dan tidak bersalah
- c) Perjuangan nasib rakyat Maluku Selatan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak mengenal perikemanusiaan
- d) Mendesak pemerintah Belanda untuk melucuti rombongan KNIL di Maluku Selatan
- e) Diharapkan pemerintah menyokong misi persaudaraan dari rakyat Maluku Selatan
- f) Pemerintah menggunakan kecerdasan dan kecakapan baik militer maupun militer maupun social

- g) Dalam tindakan pemerintah dibedakan antara rakyat Maluku Selatan dengan kaum proklamasi RMS.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa peristiwa RMS dilakukan oleh kaum reaksioner yang merupakan agen-agen imperialis dan tidak menghendaki RI dalam kesatuan yang utuh. Konferensi ini juga menghimbau kepada pemerintah untuk mengutamakan penyelesaian damai dikarenakan tidak semua rakyat Maluku merupakan pengikut dari RMS dan masih menjadi bagian utuh bangsa Indonesia.

Penumpasan Pemberontakan RMS oleh Pemerintah RI

Dalam menyelesaikan masalah RMS pemerintah mengambil jalan damai. Hal ini didasarkan pada penyelesaian GAM di Aceh bahwa penyelesaian dengan cara operasi militer tidak efektif bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Pemerintah mengadakan penyelesaian dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi kultural yang bisa memperbaiki kehidupan lokal. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengirim seorang tokoh asli dari Maluku yaitu Dr. Leimena untuk membawa misi perdamaian. Namun misi tersebut sia-sia karena mendapat penolakan dari Dr. Soumokil. Setelah adanya penolakan misi perdamaian tersebut, akhirnya pemerintah melakukan tindakan lain. Tindakan ini dikenal dengan operasi militer. Dalam Operasi militer ini dilakukan secara bertahap (Suryawan, 2013). Operasi militer bertujuan untuk menumpas gerakan RMS, dalam operasi ini mengerahkan sejumlah Gerakan Operasi Militer III yang dipimpin oleh A.A Kawilarang. Akhirnya, pada tanggal 14 Juli 1950 terjadi penumpasan pemberontakan dan selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1950 pemerintah memberitahukan bahwa Negara Republik Maluku Selatan sedang tidak aman.

Di tanggal 28 September pasukan militer menyerbu daerah Ambon dan akhirnya wilayah Ambon berhasil dikuasai oleh pasukan militer pada tanggal 3 November 1950. Dengan tergulingnya RMS di wilayah Ambon menyebabkan perlawanan Republik Maluku Selatan dapat kalah. Selanjutnya pusat pemerintahan serta angkatan perang Republik Maluku Selatan dipindahkan ke pulau Seram. Dan pada akhirnya pada tahun 1952 presiden RMS J. H. Manuhutu berhasil tertangkap di Pulau Seram. Sementara itu, sebagian dari pemimpin RMS melarikan diri ke Negeri Belanda dan mendirikan pemerintahan di pengasingan.



Gambar 1. Pelarian Soumokil dan pendukung RMS
(sumber: KITLV News Item, 2021)

Sementara itu, salah satu pimpinan RMS yaitu Dr. Soumokil berhasil bertahan hidup di hutan-hutan yang berada di pulau Seram. Namun pada akhirnya Dr. Soumokil berhasil ditangkap dan pada tanggal 2 Desember 1963 dan diserahkan ke meja hijau untuk disidang. Setelah itu Dr. Soumokil diberi hukuman mati pada tanggal 12 April 1966 di Pulau Obi, Kepulauan Seribu. Sepeninggal dari Dr. Soumokil RMS berdiri di pengangsaan Negeri Belanda, kepemimpinan RMS digantikan oleh Johan Manusama yang menjabat pada tahun 1966-1992. Namun selanjutnya tergantikan oleh Frans Tutuhatonewa hingga tahun 2010. Setelah itu digantikan oleh John Wattilate.

Perubahan yang terjadi akibat RMS di Bidang Sosial Politik

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam upaya menghentikan RMS merupakan salah satu peran besar pemerintah untuk mewujudkan kembalinya pada NKRI dari RIS (Rinardi, 2012). Pemberontakan RMS merupakan contoh ancaman terhadap NKRI dan menyebabkan perubahan-perubahan yang dialami oleh Negara Indonesia baik dalam segi sosial maupun segi politik. Beberapa perubahan yang terjadi menyebabkan kerugian besar terhadap Indonesia. Perubahan yang terjadi meliputi: hubungan antar kelompok di Maluku terganggu. Berdirinya RMS membuat Maluku terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung RMS dan kelompok pendukung NKRI. Hal ini membuat masyarakat Maluku bingung atas status kewarganegaraannya, sehingga menyebabkan perubahan yang ditimbulkan dari hubungan mereka terganggu. Selanjutnya pemberontakan RMS juga menyebabkan Hubungan Indonesia dan Belanda terganggu.

Hal ini dipengaruhi keikutsertaan Belanda untuk membantu pembentukan serta pemberontakan RMS. Selain itu juga terjadi percobaan pembunuhan terhadap duta besar Indonesia, hal ini menyebabkan hubungan antara Indonesia dan Belanda semakin buruk. Selain itu dengan adanya pemberontakan RMS ini juga memberikan dampak berkelanjutan bagi Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya pendukung RMS yang tidak ingin bergabung dengan NKRI, dan tahun pada tahun 2002 terjadi pengibaran RMS kembali di Maluku. Peristiwa tersebut sangat mengganggu dan mengancam persatuan dan kesatuan wilayah NKRI, sehingga dari peristiwa tersebut aparat

kepolisian menangkap 23 orang pendukung RMS. Sedangkan pada tahun 2004 terjadi konflik antara aktivis RMS dan NKRI.

Kesimpulan

Republik Maluku Selatan yaitu gerakan separatisme yang dibentuk khusus untuk menentang proses kembalinya RIS menjadi NKRI. RMS memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 25 April 1950. RMS dibentuk dengan tujuan melepaskan wilayah Maluku, khususnya Maluku Selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puncak kerusuhan di Maluku ditandai dengan terbakarnya kantor Gubernur Maluku pada tahun 1999 dan pada awal 2002. Selanjutnya serangan terhadap penduduk Soya dan pengibaran bendera RMS di tengah upacara Hari Keluarga Nasional. Setelah itu aktivis RMS dibawa aparat ke kantor Densus 88 Anti Teror untuk ditahan. Selanjutnya, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk meredam aksi tersebut. Pemerintah mengirim misi perdamaian terhadap RMS, namun misi tersebut ditolak oleh pimpinan RMS. Sehingga pemerintah terpaksa untuk melakukan Gerakan Operasi Militer agar pemberontakan RMS tidak semakin mengancam kesatuan NKRI. Dampak yang ditimbulkan dari aksi tersebut menyebabkan perubahan dan kerugian besar terhadap Indonesia, baik dari segi sosial maupun segi politik. RMS memberikan dampak berkelanjutan terhadap Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya pendukung RMS yang tidak ingin bergabung dengan NKRI.

Daftar Rujukan

- Fuar, J. A. (1962). *Republik Maluku Selatan*. Djakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8(1), 68-73.
- Hartati, A. Y. (2010). Separatisme dalam konteks global (studi tentang eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai gerakan separatis Indonesia). *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 7(2).
- KITLV News Item. (2021). Column Fridus Steijlen: 'Speuren naar Soumokils graf'. Retrived from < <https://www.kitlv.nl/column-fridus-steijlen-speuren-naar-soumokils-graf/>>
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leirissa, R., Ohorella, G., Harjono, S & Wulandari, T. (1993). *Tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan negara dan kesatuan NKRI: kasus Republik Maluku Selatan*. Jakarta: CV Manggala Bhakti.
- Rinardi, H. 2012. Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun 1950. *MOZAIK: Jurnal Ilmu Humaniora*, 12(2).
- Suryawan, A. 2013. Peranan APRIS Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Keutuhan RIS tahun 1949-1950. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(1).
- Waileruny, Samuel. 2010. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zed, Mastika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.